Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Kebijakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan 3C di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Shot Policy in Place Against the Actor of The 3C Crime in Jurisdiction of Polrestabes Medan

Wamilik Mabel*, Syafrudin Kalo**, Madiasa Ablisar***, M. Ekaputra****

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: wamilikmabel@gmail.com, syaf_kalo@yahoo.com, ablisar@yahoo.co.id, moh.ekaputra@gmail.com

Diterima: Oktober 2020; Disetujui: Oktober 2021; Dipublish: Oktober 2021

Abstrak

Kejahatan 3C (Curas, Curat, dan Curanmor) adalah kejahatan terhadap harta benda yang merupakan kejahatan material. Sebagai petugas pelindung dan abdi masyarakat, anggota polisi diberi wewenang untuk menembak di tempat terhadap pelaku kejahatan yang mengganggu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Anggota Polri dibekali payung hukum dalam penggunaan senjata api berdasarkan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Kebijakan Kapolrestabes Medan dalam menyikapi maraknya Kejahatan 3C di Kota Medan adalah memerintahkan jajarannya untuk menembak di tempat terhadap para pelakunya. Setiap kali Kejahatan 3C ditemukan, petugas menembak di tempat dengan pertimbangan yang matang dan dengan prosedur yang berlaku. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 1) Prosedur hukum pelaksanaan tembak-menembak di tempat merupakan kewenangan atau kewenangan diskresi untuk bertindak sesuai penilaian polisi yang dapat dibenarkan sepanjang aparat mengikuti prosedur yang berlaku (Perkap No. 1 Tahun 2009 jo. Sprint Kapolrestabes Medan No. Sprint/811/V/2014, tanggal 24 Mei 2014 tentang Operasi 810 Dalam Rangka Penindakan Terhadap Penganiaya Penahanan Kasus 3C di Wilayah Polda Medan); 2) Alasan Kapolrestabes Medan mengeluarkan kebijakan penembakan di tempat dikarenakan pelaku membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa petugas dan masyarakat serta menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan.

Kata Kunci: Kebijakan tembak di Tempat, Operasi 810, Kejahatan 3C.

Abstract

The 3C Crime is a crime against property which is a material crime. As a protective officer, protector, and public servant, members of the police are given the authority to shoot on the spot against criminals who disturb the comfort, security, and safety of the community. Members of the National Police are equipped with a legal umbrella in the use of firearms contained in the National Police Chief Regulation No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Measures. The policy of the Kapolrestabes Medan in responding to the rampant 3C Crimes in the City of Medan is to order its ranks to shoot on the spot against the perpetrators. Every time the 3C Crime is found, the officer shoots on the spot with careful consideration and by applicable procedures. The results of the study are as follows: 1) Legal procedures for the implementation of gunfire on the spot constitute a discretionary authority or authority to act according to the police's appraisal that can be justified as long as the officers follow the applicable procedures (National Police Chief Regulation No. 1 of 2009 in conjunction with the Medan Police Chief Sprint No. Sprint/811/V/2014, dated May 24, 2014, concerning Operations of 810 in the Context of Enforcement of Persecutors of 3C Case Detention in the Medan Regional Police Jurisdiction); 2) The reason of the Medan Police Chief issued a policy of firing on-site against 3C Crimes was that the perpetrators had endangered and threatened the life safety of officers and the community because they had used sharp weapons and homemade firearms.

Keywords: Firing policy on the spot, Operation 810, Crime 3C.

How to Cite: Mabel. W, Syafrudin Kalo, Madiasa Ablisar, M. Ekaputra (2021). Kebijakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan 3C di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. *Doktrina: Journal of Law*. 4 (2): 84-101

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena kompleks saat ini adalah kejahatan atau tindak pidana pencurian. Kasus pencurian yang sering terjadi semakin membuat resah. Bagaimana tidak, berbagai trik dilakukan dalam aksi pencurian mulai dari hipnotis, menggunakan obat bius, bahkan pencurian secara bergerombol dengan menggunakan senjata api, yang membuat korban tidak dapat berkutik (Hindarsono, 2013).

Pencurian yang dilakukan dengan sasaran pencurian yang tidak lagi terfokus ke rumah-rumah di malam hari, melainkan justru dilakukan di siang hari di tempat keramaian seperti: bank, toko emas, pegadaian, swalayan. Hasil rampokan pun tidak tanggung-tanggung jumlahnya yang menunjukkan bagaimana seseorang begitu kreatif dalam melakukan kejahatan (Tribun, 2011).

Jenis pencurian yang akan diteliti adalah pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang dikenal dengan kejahatan 3C. Kejahatan 3C merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian

kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan (Soekanto, 1988). Pencurian merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil). Harta kekayaan didapat dari seseorang bekerja. Pekerjaan yang dilakukan adalah demi pembangunan dirinya dan secara tidak langsung juga membangun bangsanya. Pencurian terhadap harta benda adalah kejahatan yang menghambat pembangunan karena secara tidak langsung akan menghambat orang lain untuk bekerja.

Polisi sebagai aparat yang utamanya bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah-ubah sejalan dengan dinamika masyarakat. Sebagai aparat Negara pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Anggota kepolisian diberikan kewenangan menembak di tempat terhadap penjahat pengganggu yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat. Alasannya dalam menjalankan tugas, anggota Polri dibekali payung hukum dalam mempergunakan senjata api yang dimuat dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam

Tindakan Kepolisian. Perkap ini terdiri dari 7 bab dan 17 pasal dan ditandatangani oleh Kapolri pada tanggal 13 Januari 2009. Adapun tujuan perkap tersebut dibuat adalah untuk memberikan pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Prosedur melakukan tembak ditempat dalam penangkapan ialah menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan atau meletakkan senjatanya dan memberi waktu yang cukup agar peringatan itu dipatuhi. Sebelum melepaskan tembakan, petugas polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi, yang bertujuan untuk menurunkan moril pelaku, serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan ke pelaku. Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau

orang lain disekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan.

Kebijakan Kapolrestabes Medan dalam menyikapi maraknya terjadi kejahatan 3C adalah dengan memerintahkan jajarannya untuk melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan 3C. Satreskrim Polrestabes Medan sebagai satuan kepolisian di bawah Ka.Polrestabes Medan juga mendapatkan perintah untuk itu, sehingga setiap didapati pelaku kejahatan 3C, petugas kepolisian melakukan penembakan di tempat dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pertanggungjawaban secara pidana dan kode etik polisi terhadap tersangka yang terkena tembakan yang tidak sesuai prosedur dalam penangkapan adalah jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan.

Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi antara lain tanggal dan tempat kejadian, uraian

singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka sehingga memerlukan tindakan kepolisian, alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan, rincian kekuatan yang digunakan, evaluasi hasil penggunaan kekuatan, dan akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut. Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana atau perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota polri yang bersangkutan.

Pada prinsipnya, setiap individu anggota polri wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya. Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana.

Bagian tubuh yang boleh atau menjadi sasaran dalam melakukan tembak ditempat adalah apabila dalam keadaan tidak mendesak, sesuai dengan apa yang

tercantum di Perkap haruslah ditembak dibagian kaki atau tangan (yang bersifat melumpuhkan saja). Tetapi bila terdapat perlawanan yang sangat mendesak atau terpaksa maka polisi berdasarkan prinsip kewajiban umum, polisi harus menembak mati pelaku yang sasaran tubuhnya biasanya dibagian kepala atau dada.

Apabila dalam penangkapan tersangka atau pelaku meninggal dunia akibat tembak di tempat, polisi tidak dapat disalahkan begitu saja. Harus dicari tahu dahulu dengan cara penyelidikan terhadap polisi yang melakukan tembak ditempat tersebut, apakah polisi tersebut melakukan kewenangannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ada saksi tempat kejadian, ada barang bukti yang mendukung tindakan polisi tersebut untuk melakukan tembak ditempat atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Apabila tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya, maka pertama akan disidangkan secara kode etik atau kedisiplinan sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang kode etik dipimpin oleh Anjum yang biasanya adalah kepala polisi daerah setempat dan yang menjadi

penuntutnya ialah polisi yang bekerja dibagian Provos. Di saat bersamaan dengan sidang kode etik, muncul sidang di pengadilan negeri untuk mencari tahu apa polisi tersebut memang melakukan tindak pidana atau tidak. Lalu pada saat ada putusan yang menyimpulkan bahwa polisi tersebut melakukan tindak pidana, maka melalui putusan pengadilan negeri tersebut menjadi dasar pada sidang kode etik untuk memberikan salah satu dari beberapa sanksi seperti pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan hormat atau dilakukannya pendidikan ulang profesi.

Terkait dengan kebijakan tembak di tempat tersebut dikeluarkan adalah karena kasus kejahatan di Kota Medan semakin meresahkan dari hari ke hari, lantaran pelaku semakin sadis dan korban juga semakin banyak. Dalam dua bulan terakhir, medio Mei s.d. Juli 2019, Polrestabes Medan mengamankan 47 tersangka pelaku kejahatan 3C atau pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan. Dari pengungkapan kasus tersebut, Polrestabes Medan mengamankan 56 kendaraan bermotor serta dua becak pengangkut barang. Polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam (sajam) hingga senjata api (senpi) laras

panjang rakitan yang digunakan para pelaku kejahatan 3C tersebut. Menurut Dadang, pengungkapan tersebut dilakukan selama dua bulan pada periode Juni - Juli 2019 di Polsek Medan Baru dan Polsek Patumbak.

Polrestabes Medan berhasil mengungkap 5.645 kasus tindak pidana di Kota Medan sepanjang 2019. Dari jumlah tersebut, 2.117 merupakan kasus narkoba. Tren jumlah kasus tindak pidana tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 3% (tiga persen) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 5.825 kasus tindak pidana. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 5.825 kasus tindak pidana ditangani pihak kepolisian, sedangkan tahun 2019 ini sebanyak 5.645 kasus. Dari jumlah tersebut 3.934 kasus tindak pidana diantaranya berhasil diselesaikan pihak kepolisian.

Berdasarkan data kriminalitas tersebut di atas, maka terhadap kejahatan 3C pada tahun 2019 adalah sebanyak 2.540 kasus. Adapun kasus 3C tersebut, terdiri dari: kejahatan Curas sebanyak 294 kasus, Curat sebanyak 985 kasus dan Curanmor sebanyak 1.261 kasus. Curanmor merupakan kejahatan yang terbanyak diantara kejahatan 3C lainnya, selanjutnya kejahatan Curat dan diikuti dengan kejahatan Curas.

Pemilihan topik mengenai kebijakan Kapolrestabes Medan dalam penegakan hukum kejahatan Curat, Curas, dan Curanmor (3C) untuk tembak di tempat dapat dikaji dan dianalisis lebih lanjut. Penelitian terhadap kebijakan tembak di tempat tersebut terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat merupakan kebijakan yang jika dikaji dari perspektif keadilan, tentunya akan sangat tidak adil bagi pelaku. Tembak di tempat tersebut seyogyanya terdapat prosedural hukum untuk dilakukan, seperti penembakan dilakukan pada bagian betis kaki pelaku, untuk menimbulkan efek jera. Namun, tetap saja belum mampu menghapus tindak kejahatan 3C tersebut, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Adapun permasalahan tujuan penelitian ini adalah bagaimana prosedur hukum yang berlaku bagi aparat penegak hukum, petugas Polri dalam melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan 3C.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Soekanto, 2001). Sifat penelitian adalah deskriptif analisis (Marzuki, 2007). Pendekatan penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach). Data yang digunakan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier (Fajar dan Achmad, 2015). Selanjutnya data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan ("library research") dan studi lapangan (field research) (Zed, 2008). Teknik analisis data menggunakan metode analisa kualitatif (Bungin, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Hukum Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan 3C

Salah satu bentuk tindak pidana pencurian yang sangat meresahkan saat ini adalah tindak pidana pencurian, baik pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, maupun pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan yang dikenal dengan kejahatan 3C tersebut dikenal dengan "pembegalan". Kejahatan 3C atau pembegalan dapat dikatakan sebagai perbuatan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara paksa dan melalui tindakan kekerasan maupun pemberatan. Pencurian dengan motif pembegalan yang terjadi, banyak diantaranya yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama (Frederica, 2019).

Beragam alasan muncul menjadikan pelaku pembegalan menjadi lebih berani melakukan kejahatan terang-terangan, tidak hanya dilakukan pada malam hari namun juga dilakukan pada siang hari, tidak juga di tempat yang jauh dari keramaian namun juga di tengah kawasan yang ramai. Bahkan, tidak jarang pelaku yang dulu hanya bermodalkan senjata tajam (sajam), kini bahkan banyak sekali dari pelaku yang tertangkap ditemukan pula senjata api (senpi). Senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan atau senjata api ilegal yang tidak memiliki izin dalam pemakaiannya.

Salah satu tugas aparat kepolisian adalah menangkap orang yang melakukan suatu tindak pidana. Masyarakat menganggap bahwa tugas penangkapan selalu berjalan lancar apabila proses penangkapan terhadap pelaku tidak mendapatkan perlawanan atau pelaku kooperatif dalam proses penangkapannya, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan berlebihan oleh pihak kepolisian. Namun faktanya, tidak jarang petugas di lapangan harus menerima tindakan kekerasan akibat perlawanan dari tersangka yang melakukan perlawanan secara aktif, bahkan dianggap membahayakan petugas yang melakukan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Yasir Ahmadi, Kapolsek Sunggal Polrestabes Medan menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, terkadang pihak kepolisian menemui hambatan-hambatan. Salah satu hambatan tersebut adalah adanya perlawanan dari tersangka pada saat petugas berusaha melakukan penangkapan. Oleh karena itu, kepolisian dibekali kewenangan diskresi dalam penerapan tugasnya di lapangan. Diskresi ini merupakan tindakan yang harus diambil oleh seorang polisi dengan memperhatikan tingkatan kerja sama tersangka dalam situasi tertentu, serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab-akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan yang ada di lapangan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelaksanaan tindakan tegas kepolisian dalam melumpuhkan pelaku Kejahatan 3C umumnya dikaitkan dengan kewenangan dalam melakukan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar

hukum pelaksanaan tembak di tempat, serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat itu dapat diberlakukan, dan juga dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan. Pada dasarnya, tindakan tegas berupa tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan/atau pelaku mengancam keselamatan polisi atau orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara. Tujuan dari melakukan tindakan tegas dan terukur tersebut adalah untuk melumpuhkan pelaku, bukan untuk mematikan pelaku.

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan 3C, polisi harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan kekuatan, maupun penggunaan senjata api oleh Polri. Dalam pelaksanaan kewenangan tindakan tegas agar nantinya tidak melanggar hukum sehingga setiap prosedur tembak di tempat oleh petugas kepolisian terhadap pelaku kejahatan 3C dapat dibenarkan secara hukum.

Tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian di

lapangan terhadap pelaku kejahatan yang mengakibatkan pelaku harus dilumpuhkan dengan tembakan, terkadang pelaku meninggal dunia yang seringkali dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, tindakan yang dilakukan oleh Polisi tersebut memang benar-benar harus dilakukan akibat situasi di lapangan yang membahayakan petugas.

Menurut penjelasan Kompol. Yasir Ahmadi, bahwa terhadap setiap tersangka tindak pidana berlaku asas praduga tidak bersalah merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari Hak Asasi Manusia (HAM). Asas praduga tidak bersalah erat kaitannya terhadap prosedur tembak di tempat dikarenakan asas ini merupakan salah satu asas yang memberikan perlindungan HAM atas seseorang tersangka/terdakwa tindak pidana. Asas praduga tidak bersalah atau *Persumption of Innocence* ini, jika ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan merupakan penerapan *acquisitoir* yaitu menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. Tersangka/terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan

manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Sedangkan, obyek pemeriksaan dalam asas *acquisitoir* adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa, maka ke arah itulah pemeriksaan harus ditujukan.

Adapun konsekuensi logis dari asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* ini, maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan, maupun untuk mendapatkan tindakan yang layak pada saat dilakukan penyidikan dan penangkapan oleh polisi. Namun polisi sebagai aparat penegak hukum juga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku apabila dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka, tersangka tersebut melakukan perlawanan yang dapat dianggap membahayakan petugas di lapangan. Permasalahan mendasarnya adalah bahwa penerapan tindakan tegas dan terukur tersebut dilakukan tidak konsisten, sebab setiap petugas di lapangan akan berbeda dalam memaknai peristiwa di lapangan menurut sudut pandangnya masing-masing sehingga hal ini menjadi rentan dan

bersinggungan serta berpotensi adanya pelanggaran HAM dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa prosedur tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku Kejahatan 3C (Pembegalan) yang dapat dibenarkan secara hukum, maka seorang petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Kemudian sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara antara lain menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya dan memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi, serta dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, tindakan peringatan tidak perlu dilakukan.

Petugas kepolisian wajib mengedepankan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Secara legalitas penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri No.

1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang bertujuan untuk melumpuhkan pelaku. Namun, dalam hal kebijakan tembak di tempat oleh Kapolrestabes Medan hingga saat ini masih menggunakan Surat Perintah No. Sprin/811/V/2014 tertanggal 24 Mei 2014. Surat Perintah tersebut berisikan “Operasi 810” dalam rangka penindakan para pelaku Kejahatan 3C (“Curas, Curat, dan Curanmor”) di wilayah hukum Polresta Medan. Secara nesesitas, petugas polisi harus dalam keadaan terdesak dan/atau pelaku mengancam keselamatan petugas atau orang-orang yang berada di sekitar TKP. Secara proporsionalitas, tujuan tembak di tempat bagi pelaku Kejahatan 3C adalah untuk melumpuhkan.

Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Curas, Curat, dan Curanmor (3C) Ditinjau Dari Perspektif Keadilan di Wilayah Hukum Polresta Medan

Kebijakan hukum pidana (penal policy) di Wilayah Hukum Polresta Medan terkait dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menggunakan upaya represif dengan cara mengikuti kebijakan hukum pidana yang dikeluarkan oleh

Kapolrestabes Medan. Adapun kebijakan Kapolrestabes Medan terkait dengan pencurian kendaraan bermotor adalah melalui Surat Perintah No. Sprin/811/V/2014 tertanggal 24 Mei 2014. Surat Perintah tersebut berisikan “Operasi 810” dalam rangka penindakan para pelaku penadahan Kasus 3C “Curas, Curat, dan Curanmor” di wilayah hukum Polresta Medan. Curas adalah pencurian dengan kekerasan, curat adalah pencurian dengan pemberatan, dan curanmor adalah pencurian kendaraan bermotor.

Operasi 810 tersebut memerintahkan kepada personil yang ditugaskan untuk melakukan penindakan ditempat apabila tertangkap tangan melakukan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Penindakan tersebut berupa menembak pelaku dengan cara: 1) “Memberitahukan kepada pelaku tentang identitas personil; 2) Memperingatkan pelaku dengan menembakkan ke atas; 3) Apabila pelaku melakukan perlawanan barulah dilakukan penembakan dengan tujuan untuk melumpuhkan pelaku yaitu penembakan di kaki”.

Prosedur tersebut tidak dijalankan, maka personil yang melakukan penembakan tersebut akan ditindak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penindakan terhadap personil kepolisian yang tidak menjalankan prosedur tersebut adalah melalui Propam Polrestabes Medan.

Apabila Kapolrestabes Medan mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan 3C, maka seluruh jajaran wajib mengikutinya. Dalam mengeluarkan kebijakan tersebut, Kapolrestabes Medan wajib mempunyai dasar hukum dan alasan kenapa dikeluarkannya kebijakan tersebut. Adapun kebijakan yang dikeluarkan Kapolrestabes Medan terkait dengan upaya penal penanggulangan kejahatan 3C adalah dengan mengawasi residivis yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) terkait dengan tindak pidana kejahatan 3C yang dilakukannya. Sehingga dapat mengontrol pergerakan residivis tersebut. Pengawasan terhadap residivis ini dilakukan karena para pelaku akan selalu mengulangi perbuatannya.

Kebijakan hukum pidana (penal policy) di Wilayah Hukum Polrestabes Medan terkait dengan penanggulangan tindak pidana Kejahatan 3C menggunakan upaya represif dengan cara mengikuti kebijakan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Kapolrestabes Medan. Kebijakan penggunaan hukum pidana (Penal Policy)

di Wilayah Hukum Polrestabes Medan berasal dari Kapolrestabes Medan.

Adapun kebijakan Kapolrestabes Medan terkait dengan kejahatan 3C adalah melalui Surat Perintah No. Sprin/811/V/2014 tertanggal 24 Mei 2014. Surat Perintah tersebut berisikan "Operasi 810" dalam rangka penindakan para pelaku penadahan Kasus 3C "Curas, Curat, dan Curanmor" di wilayah hukum Polrestabes Medan. Curas adalah pencurian dengan kekerasan, curat adalah pencurian dengan pemberatan, dan curanmor adalah pencurian kendaraan bermotor.

Adapun kebijakan yang dikeluarkan Kapolrestabes Medan terkait dengan upaya penal penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah dengan mengawasi residivis yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukannya. Sehingga dapat mengontrol pergerakan residivis tersebut. Pengawasan terhadap residivis ini dilakukan karena para pelaku akan selalu mengulangi perbuatannya.

Menurut Kopol. Yasir Ahmadi, juga menjelaskan bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pengungkapan Kejahatan 3C, Polrestabes Medan dan jajarannya

telah melakukan berbagai upaya, baik melalui upaya preventif maupun represif guna menekan angka tindak pidana tersebut di wilayah hukum Polrestabes Medan. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Medan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Upaya Preventif. Upaya preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya atau upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi adanya tindak kejahatan. Kepolisian berupaya untuk melakukan upaya pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat antara lain dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk secara mandiri melakukan pengamanan di wilayahnya masing-masing dengan menggiatkan kegiatan Siskamling atau Ronda, upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta kegiatan razia yang dilakukan pada saat-saat tertentu dan waktu-waktu tertentu yang dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya potensi kejahatan terutama yang dilakukan di wilayah-wilayah yang rawan kejahatan.

Upaya Represif. Upaya represif merupakan cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi.

Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan Polrestabes Medan untuk menanggulangi pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kota Medan, dilakukan dengan operasi-operasi yang secara terus-menerus dilakukan. Operasi-operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan kepolisian secara lengkap, diantaranya: Samapta, Intelejen, Binmas dan Reserse. Operasi-operasi tersebut diadakan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda sehingga tujuan dari diadakannya operasi tersebut adalah sebagai upaya menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan.

Khusus dalam penanganan kejahatan 3C, Kepolisian Resort Kota Besar Medan (Polrestabes Medan) sejak 2016 yang lalu telah membentuk Tim Anti Begal Polrestabes Medan sebagai unit yang diprioritaskan penanganan kasus kejahatan 3C yang terjadi yang terjadi di seluruh wilayah Kota Medan. Hal ini dilakukan sebagai respon dari aspirasi masyarakat yang merasa sangat resah dengan pelaku pembegalan, sebab kini pelaku tidak lagi hanya bermodalkan senjata tajam bahkan mereka menggunakan senjata api dan tidak segan-segan bertindak sadis, bahkan tak jarang mereka membunuh korbannya apabila melawan”.

Berdasarkan wawancara di atas dan dikaitkan dengan penelitian ini, maka kebijakan penanggulangan Kejahatan 3C (Pembegalan) dengan menggunakan upaya hukum non-penal dapat dilakukan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, dengan upaya pre-emptif dan preventif.

a. Upaya Pre-Emptif.

Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan Polrestabes Medan untuk menanggulangi kejahatan 3C adalah melakukan penyuluhan ke masyarakat yang dilakukan salah satu unsur Polrestabes Medan, yaitu Babhinkamtibmas. Adapun penyuluhan yang dilakukan oleh Babhinkamtibmas dengan mengumpulkan seluruh Sekuriti (Tenaga Pengamanan) dari perusahaan-perusahaan maupun perumahan-perumahan. Isi penyuluhan yang diberikan adalah mengenai bagaimana cara menjaga dan memelihara lingkungan dari orang luar atau orang tidak dikenal.

b. Upaya Preventif

1) Patroli dan Tingkatkan Siskamling Masyarakat

Pendekatan preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dengan melakukan patroli dan razia di jalan-jalan umum di wilayah-wilayah yang dianggap rawan, melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan secara

cermat guna menghindari pemalsuan surat-surat (SIM, STNK, BPKB) yang meluas, melakukan pengawasan terhadap bengkel-bengkel kendaraan bermotor yang dicurigai sebagai tempat penadahan, melakukan penangkapan terhadap pelaku, penadah dan pemalsu surat-surat kendaraan, kemudian meneruskan para tersangka maupun penadah yang melakukannya ke pengadilan agar mendapatkan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya.

Kemudian sebagai upaya memaksimalkan upaya penanggulangan Kejahatan 3C (Pembegalan), Tim Anti Begal Polrestabes Medan harus bekerja secara berkelanjutan untuk menangkal aksi pembegalan yang semakin meresahkan. Secara rutin berpatroli di wilayah-wilayah rawan, serta melakukan reaksi cepat setiap adanya kejadian Kejahatan 3C (Pembegalan) di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Dalam mengantisipasi faktor penyebab terjadinya Kejahatan 3C, maka seharusnya masyarakat juga dapat berperan menjadi “penegak hukum” di tengah ligkungannya sendiri dengan secara aktif berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga potensi terjadinya tindak pidana di lingkungannya dapat

ditekan sedini mungkin. Misalnya, aktif mengadakan kegiatan Siskamling atau ronda malam secara bergiliran di antara warga lingkungan setempat.

2) Membuka Saluran Telepon Pengaduan Masyarakat (Aplikasi Polisi Kita)

Adapun upaya-upaya non-penal yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara membuka saluran telepon untuk Dumas (Pengaduan Masyarakat) terkait dengan kehilangan kendaraan bermotor. Upaya tersebut telah lama dilakukan. Saluran telepon tersebut digunakan untuk gerak cepat agar dapat menangkap pelaku di tempat kejadian perkara.

Aplikasi Polisi Kita dapat digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan pengaduan masyarakat kepada pihak kepolisian apabila diketahui ada terjadi tindak pidana di wilayah hukum Polrestabes Medan. Pengaduan dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan telepon genggam (Android), lalu membuat akun dan dapat langsung membuat laporan dengan melampirkan foto-foto kejadian sebagai bukti.

3) Meningkatkan Kewaspadaan Dengan Menambah Kunci Ganda

Upaya preventif lainnya dengan cara meningkatkan kewaspadaan dalam memarkirkan kendaraan, dengan

menambah kunci ganda setiap kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan sosialisasi dengan masyarakat yang datang ke Polrestabes Medan.

4) Kebijakan Lain Polrestabes Medan Sebagai Upaya Non-Penal Untuk Menekan Kejahatan 3C di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Kasus kejahatan di Medan semakin meresahkan dari hari ke hari, lantaran pelaku semakin sadis dan korban juga semakin banyak. Pada tahun 2019, antara bulan Juni s.d. Juli 2019, Polrestabes Medan sewaktu dipimpin Kombes Pol. Dadang Harianto, selaku Kapolrestabes Medan, mengatakan:

“Dalam dua bulan terakhir pihaknya mengamankan 47 tersangka pelaku Kejahatan 3C atau Curas, Curat, dan Curanmor. Dari pengungkapan kasus tersebut, Polrestabes Medan mengamankan 56 kendaraan bermotor serta dua becak pengangkut barang. Polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam (sajam) hingga senjata api (senpi) laras panjang rakitan yang digunakan para pelaku Kejahatan 3C tersebut.

Pengungkapan tersebut dilakukan selama 2 bulan pada periode Juni – Juli 2019 di Polsek Medan Baru dan Polsek Patumbak. Aksi para pelaku sangat meresahkan lantaran tidak hanya sajam

dan senpi panjang rakitan yang digunakan, pelaku juga menggunakan peralatan lainnya: kunci T, alat potong besi, tang, dan linggis hingga satu pucuk senjata api rakitan berikut 7 peluru aktif.

Dari Polsek Medan Baru, pada 22 Juni 2019, Petugas telah menangkap 3 (tiga) orang pelaku pencurian dengan pemberatan di malam hari. Pelaku membongkar dan mengambil kendaraan bermotor. Setelah dilakukan pengembangan, ternyata para pelaku memiliki rekam jejak di 30 Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kemudian dari Polsek Patumbak, pada 18 Juli 2019, Petugas juga telah menangkap 2 (dua) orang pelaku kejahatan yang mencuri kendaraan bermotor dan ternyata juga memiliki rekam jejak pada 10 TKP".

Berdasarkan keterangan pers tersebut di atas, dapat diketahui bahwasanya para pelaku Kejahatan 3C rata-rata adalah residivis yang telah "profesional" dalam menjalankan aksinya. Oleh karenanya, Polrestabes Medan mempunyai kebijakan lain sebagai upaya non-penal untuk menekan angka Kejahatan 3C berupa membuat database pelaku/residivis Kejahatan 3C. Pelaku Kejahatan 3C sebenarnya pelakunya jarang pemain baru, sehingga kejahatan

tersebut merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain membuat database tersebut, kebijakan non-penal lainnya yaitu membuat dan memasang CCTV pada setiap daerah-daerah di Kota Medan yang rawan kejahatan. Pemasangan CCTV sangat penting karena dapat memonitor kegiatan menyimpang pada masyarakat, sehingga dapat diidentifikasi dan diungkap. Polrestabes Medan juga telah menjalin hubungan kerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kota Medan agar CCTV dapat terkoneksi dengan baik memanfaatkan teknologi dan informasi yang sudah berkembang, namun demikian jumlahnya masih sangat terbatas.

Adapun jumlah CCTV untuk Kota Medan hanya sebanyak 174 titik, dibandingkan dengan kota lainnya sangat jauh dari layak. Efektifnya, CCTV harus mencapai ribuan, jadi kalau ada CCTV, jika diketahui ada kejadian pada titik tertentu, pihak Petugas Anti Begal Polrestabes Medan dapat memonitor dari mana pelaku bergerak sampai melakukan aksinya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian dasarnya prosedur hukum pelaksanaan tindakan tembak di tempat

merupakan “kewenangan diskresi” atau “kewenangan bertindak” menurut penilaian sendiri petugas kepolisian di lapangan yang dapat dibenarkan pelaksanaannya sepanjang aparat kepolisian mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Adapun prosedur yang dilaksanakan adalah petugas kepolisian wajib mengedepankan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Sebelum menggunakan senpi, petugas wajib memberikan peringatan jelas dengan cara: menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polisi yang sedang bertugas, memberikan peringatan dengan ucapan yang jelas dan tegas kepada pelaku untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya dan memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi, serta dalam keadaan terdesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau masyarakat di sekitar TKP. Dasar hukum pelaksanaan tembak di tempat terhadap pelaku Kejahatan 3C, yaitu: Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian jo. Surat Perintah Kapolrestabes Medan No. Sprin/811/V/2014, tertanggal 24 Mei 2014. Kebijakan Kapolrestabes Medan dalam melakukan penegakan hukum

Kejahatan 3C terdiri dari Kebijakan Penal dan Kebijakan Non-Penal. Kebijakan hukum pidana (penal policy) terkait dengan penanggulangan Kejahatan 3C menggunakan upaya represif dengan cara menjalankan kebijakan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Kapolresta Medan melalui Surat Perintah No. Sprin/811/V/2014 tertanggal 24 Mei 2014 yang dikenal dengan “Operasi 810”. Operasi tersebut memerintahkan kepada setiap personil di jajaran, khususnya Tim Anti Begal untuk melakukan penindakan di tempat apabila kedapatan pelaku kejahatan sedang melakukan kejahatannya. Kebijakan Non-Penal Polrestabes Medan, terdiri dari: upaya pre-emptif dan preventif. Upaya pre-emptif, jajaran Tim Anti Begal Polrestabes Medan melakukan penyuluhan masyarakat yang dilakukan oleh salah satu unsur Polrestabes Medan, yaitu: Babhinkamtibmas. Upaya preventif, jajaran Tim Anti begal Polrestabes Medan, melakukan Patroli dan meningkatkan siskamling di masyarakat, Membuat database residivis pelaku Kejahatan 3C, Membuka saluran telepon pengaduan masyarakat (Aplikasi Polisi Kita) dan Meningkatkan kewaspadaan dengan menambah kunci ganda pada kendaraan bermotor pada saat diparkirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R., (1997), Hukum Kepolisian : Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum, Jakarta: Restu Agung.
- Ali, Achmad., (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. (2010). Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alius, Suhardi., Menjalin Sinergi: 14 Bulan Sebagai Kabareskrim Polri, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Februari 2019.
- Anwar, H.A.K. Moch. (1986). Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2, Bandung: Alumi.
- Arief, Barda Nawawi., Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- . (2005). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2008). Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana.
- . (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- . (1971). Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Raja Grafindo Persada.
- Bruggink, JJ., (1999). Refleksi tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. (2003). Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayu Media.
- Consedine, Jim. (1995). Restorative Justice : Healing the Effects of Crime, Lyttelton: Ploughshares Publications.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Darmodiharjo, Darji., dan Shidarta. (2006). Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Echol, M. John., dan Hasan Shadilly. (2002). Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faal, M., (1991). Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi : Diskresi Kepolisian, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Friedman, Lawrence M. (2009). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media.
- Gunadi, Ismu., dan Jonaedi Efendi. (2015). Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, Jakarta: Kendana Prenadamedia Group.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdan, M. (1997). Politik Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jonkers, JE. (1987). Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta: Bina Aksara.
- Kartanegara, Satochid., Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Komisi Kepolisian Nasional. (2002). Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan, Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional.
- Kunarto. (1997). Perilaku Organisasi Polri, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Lamintang, P.A.F. (1989). Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung: Sinar Baru.
- Makarin, Ednom. (2003). Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mansyur, Ridwan., (2008). Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Jakarta: Yayasan Gema Yustisia, Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masyhar, Ali. (2009). Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
- Meuwissen, (2007). Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (1983). Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mugopal. (2012). Undang., Hukum Untuk Manusia, Kado (Tak) Istimewa dari Fakultas Hukum UNISBA untuk Indonesia, Jakarta: Pilar Utama Mandiri.
- Muhammad, N.A. Noor., Ifdhal Kasim (Editor). (2001). Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan, Jakarta: Elsam.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumi.
- Muladi. (1996). Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: Universitas Diponogoro.
- Mulyadi, Mahmud. (2008). Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan

- Kejahatan Kekerasan, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nurcholis, Hanif. (2005). Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo.
- Permana, Is. Heru. (2007). Politik Kriminal, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Poerwadarminta, WJS. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pohan, Agustinus., dkk. (2012). Hukum Pidana Dalam Perspektif, Denpasar: Pustaka Larasan.
- Projodikoro, Wirjono. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Purnomo, Bambang. (1985). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Puspa, Yan Pramadya. (1977). Kamus Hukum, Semarang: Aneka Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- . (1991). Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sadjijono, H., dan Bagus Teguh Santoso, Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan, Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Sahetapy, JE. (1979). Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Bandung: Alumni.
- Sahetapy, JE., dan B. Mardjono Reksodiputro. (1990). Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial, Bandung: Alumni.
- Salam, Faisal. (2004). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Pustaka.
- Santoso, Muhari Agus. (2002). Paradigma Baru Hukum Pidana, Malang: Averroes Press.
- Sholehudin, Umar. (2011). Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum, Malang: Setara.
- Simorangkir, dkk. (2002). Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Siregar, Bismar. (1983). Hukum Acara Pidana, Jakarta: Penerbit Binacipta.
- Soeharto, (1993). Hukum Pidana Materiil, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono., Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto. (1988). Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi, Jakarta: Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soemardipraja, A. (1977). Himpunan Putusan Mahkamah Agung Disertai Kaidah-Kaidahnya, Bandung: Remaja Karya.
- Soesilo, R. (1994). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Alumni.
- . (1981). Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.